HUBUNGAN KRISIS KEUANGAN GLOBAL DENGAN REGULASI PERBANKAN

Solehoddin^{1*)}, Mufidatul Ma'sumah²⁾

¹⁾ Program Studi S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

²⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Data Artikel:

Naskah masuk, 6 Januari 2024

Direvisi, 28 Januari 2024

Diterima, 29 Januari 2024

Email Korespondensi:

Solehoddin@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Krisis ekonomi global memberikan dampak yang besar pada organisasi di berbagai skala tujuan dan jenis. Secara keseluruhan, berbagai bidang kehidupan telah terkena dampak, tidak hanya secara finansial tetapi juga dengan peningkatan dan perubahan teknologi yang mempengaruhi keluaran layanan dan format materi dan aksesibilitas. Salah satu aspek yang memberikan pengaruh dalam keberlangsungan ekonomi adalah hukum. Dalam paper ini dibahas mengenai hubungan antara krisis keuangan global dengan regulasi perbankan. Digunakan metode kualitatif deskriptif dalam penulisan paper ini dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Kata Kunci: Perbankan, Regulasi, Krisis ekonomi global

1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa sudah lebih dari 10 tahun lamanya sejak krisis keuangan global melanda dunia. Seperti yang umumnya terjadi setelah setiap krisis keuangan melanda, krisis ini juga memicu adanya sebuah reformasi regulasi yang memiliki jangkauan luas, karena pada dasarnya regulasi dan pengawasan yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan inklusivitas sektor perbankan dan krisis juga mengungkapkan banyak kekurangan. Satu decade lebih setelah krisis adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk melihat reformasi apa yang telah terjadi setelah krisis, apakah reformasi itu diadopsi atau tidak di negara berkembang, dan apa dampaknya.

Negara yang sedang berkembang terpukul keras oleh krisis keuangan dan ekonomi, meskipun dampaknya agak tertunda. Setiap masing-masing negara memiliki tantangan yang berbeda untuk dikuasai. Semakin dekat suatu negara-negara berkembang saling berhubungan dengan ekonomi dunia, semakin kasar dampaknya. Dan pemulihan baru yang mulai terlihat, untuk saat ini, terbatas hanya pada beberapa negara dan wilayah. Krisis ditransmisikan terutama oleh arus perdagangan dan keuangan yang memaksa jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium sangat terancam di banyak negara. Banyak negara berkembang tidak dan tidak memiliki sumber daya untuk merangsang ekonomi dan melindungi penduduknya yang kurang beruntung secara sosial pada tingkat yang sama seperti negara-negara industri. Namun, banyak negara telah melakukan upaya yang cukup besar untuk mengurangi efeknya. Negara-negara berkembang juga telah meningkatkan kerjasama mereka satu sama lain dan sangat menuntut suara yang lebih besar dalam urusan ekonomi global [1].

Negara-negara industri sebagian besar lebih peduli dengan masalah mereka sendiri. Kesiapan mereka untuk memberikan bantuan yang lebih luas terbatas. Mereka mendapat tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengendurkan dominasi mereka sebelumnya demi negara-negara berkembang yang semakin kuat. Pergeseran kekuasaan dan pengaruh yang sudah terlihat sebelum krisis keuangan semakin dalam. Meskipun pola pemulihan sekarang tidak konsisten, ada juga ketidakkonsistenan yang serupa dalam dampak krisis keuangan dan ekonomi pada masing-masing negara dan wilayah di seluruh dunia.

Untuk waktu yang lama diharapkan threshold dan negara-negara berkembang dapat memutuskan hubungan dari krisis keuangan di negara-negara maju Amerika dan Eropa karena kondisi struktural ekonomi makro yang membaik. Namun, gagasan memutuskan hubungan dari krisis terbukti salah. Krisis memang berdampak pada negara-negara berkembang, terutama melalui aliran keuangan dan melalui perdagangan. Negara-negara berkembang dan organisasi internasional mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak krisis, tetapi dengan hasil yang bervariasi. Agenda diskusi internasional masih tetap memperhatikan kepentingan negara-negara kaya.

Pembuat kebijakan telah berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem keuangan dan ekonomi dengan memberlakukan serangkaian besar reformasi keuangan, baik di tingkat internasional maupun domestik. Reformasi hingga saat ini, dengan mempertimbangkan diagnosis krisis, memberikan beberapa wawasan tentang apa lagi yang mungkin dibutuhkan. Namun, untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan reformasi spesifik lebih lanjut merupakan tantangan, karena alat yang "benar" dapat sulit diidentifikasi dan masalah konseptual dan praktis menimbulkan banyak pengorbanan yang sulit. Jelas ada banyak "ketergantungan jalur" dalam reformasi yang dilakukan hingga saat ini dapat membatasi pilihan ke depan dan pemikiran ulang radikal mungkin tidak layak secara teknis atau politik. Lebih jauh, negara-negara berbeda dalam banyak dimensi, menunjukkan pilihan reformasi akan bervariasi, dan mungkin akan sangat berpengaruh.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi dan literatur untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Data diambil dari literatur berupa jurnal atau buku yang berhubungan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang didapat. Tinjauan pustaka dapat membantu untuk memberikan gambaran umum tentang bidang-bidang di mana penelitian yang dilakukan berbeda namun berhubungan dan bersifat interdisipliner.

Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, tidak digunakan populasi dikarenakan penelitian yang dilakukan berjenis kualitatif deskriptif yang mana penelitian berdasarkan kasus atau fenomena tertentu yang terdapat pada kondisi serta situasi sosial tertentu. Hasil kajian yang diperoleh tidak akan berorientasi pada populasi, namun didistribusikan menuju situasi sosial pada fenomena yang dikaji. Namun, agar tinjauan pustaka menjadi metodologi penelitian yang tepat, seperti halnya penelitian lainnya, penulis perlu menjalankan langkah-langkah yang tepat perlu diikuti dan tindakan diambil untuk memastikan tinjauan itu akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Seperti semua penelitian, nilai tinjauan akademis tergantung pada apa yang dilakukan, apa yang ditemukan, dan kejelasan pelaporan. Bergantung pada tujuan tinjauan, peneliti dapat menggunakan sejumlah strategi, standar, dan pedoman yang dikembangkan terutama untuk melakukan tinjauan pustaka [2].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode sebelum krisis keuangan adalah salah satu kegembiraan yang cukup besar, terutama di sektor perbankan di banyak negara maju. aset sistem perbankan, kredit dan keuntungan tumbuh pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kegiatan ekonomi. Risiko sering diabaikan dalam kompensasi dan struktur insentif lainnya - yang sangat dihargai keuntungan jangka pendek atas pengembalian jangka panjang yang berkelanjutan - dan tidak dinilai dengan benar dalam strategi bank. Standar kredit dilonggarkan, dan banyak bank mengandalkan jangka pendek pasar grosir untuk mendanai kegiatan. Prosiklikalitas yang melekat pada sistem keuangan juga membantu mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang saling menguatkan. Bank di beberapa negara beroperasi dengan modal dan penyangga likuiditas yang relatif tipis. Bisnis lintas batas bank-bank besar berkembang pesat, seperti halnya pendapatan dari aktivitas yang kompleks dan tidak jelas, termasuk sekuritisasi terstruktur dan derivatif over-the-counter (OTC). Meskipun perkembangan sebelum krisis di sektor perbankan menjadi inti dari krisis, faktor lain berkontribusi, termasuk insentif yang tidak selaras dalam sekuritisasi proses dan secara implisit dukungan pemerintah terhadap bank, regulasi bank yang tidak memadai dan pengawasan di banyak negara, kurangnya diskriminasi risiko di pasar kredit dan peningkatan leverage di beberapa bagian sektor non-keuangan.

Krisis ini dipicu sekitar pertengahan 2007 oleh deflasi perumahan AS booming, mengakibatkan kerugian yang dilaporkan cukup besar pada kredit hipotek terstruktur AS dan ketidakpastian tentang sejauh mana eksposur institusi terhadap aset-aset ini. Pengetatan kondisi keuangan selama bulan-bulan berikutnya mengekspos pola yang jauh lebih luas dari pengambilan risiko yang berlebihan, transformasi kedewasaan, dan kerentanan akut dalam industri perbankan global. Karena beberapa bank (dan perantara keuangan lainnya) dating di bawah tekanan likuiditas, bank sentral secara signifikan memperluas fasilitas likuiditas mereka. NS penutupan pasar pendanaan bank setelah kegagalan Lehman Brothers pada September 2008 mendorong pemerintah untuk menjamin pendanaan grosir bank. Banyak bank di Eropa dan Amerika Serikat gagal atau menerima suntikan modal pemerintah, dan beberapa dinasionalisasi. Skema pelepasan aset didirikan di beberapa negara untuk membantu bank mengatasi aset bermasalah mereka. Upaya tersebut berhasil mencegah runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi. Tetapi biaya fiskal yang dihasilkan dari dukungan keuangan langsung sektor perbankan, kerugian output

dan peningkatan utang public sangat substansial, dalam beberapa kasus menimbulkan kekhawatiran tentang solvabilitas berdaulat.

Krisis mempengaruhi semua sistem perbankan besar, meskipun dampaknya bervariasi karena kondisi siklus awal yang berbeda dan kerentanan structural. Sementara bank-bank di kawasan euro, Inggris dan Amerika Serikat menderita kerugian besar pada puncak krisis, di Australia, Kanada dan Swedia bernasib lebih baik dan tidak membutuhkan dukungan modal pemerintah. Bank EME lebih banyak terisolasi dari gejolak mengingat fokus domestik mereka, penggunaan pasar yang relatif rendah pendanaan dan penyangga peraturan yang umumnya lebih tinggi, yang terakhir mencerminkan sebagian pelajaran dari krisis keuangan sebelumnya. Respons kebijakan terhadap krisis juga berkontribusi pada heterogenitas hasil. Misalnya, proses perbaikan dan rekapitalisasi neraca bank di Amerika Serikat berlari di depan itu di beberapa negara Eropa.

Krisis ekonomi merupakan hal yang menerangkan hawa sesungguhnya suatu kondisi ekonomi tengah mengalami resesi atau depresi. Secara garis besar krisis keuangan telah berdampak buruk pada sistem perbankan, pilar utama ekonomi yang sehat. Dalam pengertiannya maka, maka krisis keuangan global merupakan krisis keuangan yang bersifat mendunia. Krisis keuangan yang bersifat global tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu krisis dengan berbagai dampaknya yang tidak hanya dialami oleh satu negara, namun hal ini juga dialami banyak negara dan melintasi batasan wilayah dunia.

Krisis keuangan global memiliki dua dampak yang sangat nyata yaitu dampak langsung dan secara tidak langsung. Dampak langsung dari krisis keuangan global khususnya adanya kerugian beberapa perusahaan yang berinvestasi dan bergerak pada institusi-institusi keuangan. Perusahaan yang bergerak di insitusi keuangan tersebut pada umumnya adalah meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar, turunnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks bursa dan sejumlah bank/institusi keuangan/ korporasi mengalami kesulitan keuangan yang berujung mengalami kebangkrutan. Sedangkan dampak secara tidak langsung dari krisis keuangan global adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga secara pesat, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar mata uang dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. Dalam hal tersebut tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap institusi keuangan ikut menurun sehingga menyebabkan melemahnya pasar modal.

Kekurangan likuiditas yang diakibatkannya berdampak pada ekonomi riil; permintaan konsumen, kepercayaan dan investasi menyusut di mana-mana, sementara pengangguran meningkat. Keadaan luar biasa ini telah menyerukan peningkatan intervensi publik di pasar. Sebagian besar pemerintah telah mengambil langkah-langkah mendesak untuk menstabilkan sistem perbankan, melalui bail-out dan nasionalisasi, sehingga bank dapat melanjutkan perannya dalam menyediakan likuiditas dan mendukung investasi dalam ekonomi riil [3]. Pemerintah juga telah memberikan dukungan kepada industri tertentu, terutama yang bergantung pada kredit konsumen, khususnya produsen mobil. Penurunan ekonomi meningkatkan kemungkinan negara-negara beralih ke kebijakan proteksionis yang akan menguntungkan produsen barang dan jasa dalam negeri. Politisi, menghadapi tekanan domestik yang meningkat dari serikat pekerja dan lobi industri, mungkin merasa bahwa prioritas pertama mereka adalah menjinakkan resesi di negara mereka masing-masing, mendukung industri lokal dan memperlambat pengangguran lokal dengan segala cara.

Krisis telah memperjelas bahwa terlepas dari apa yang tampak sebagai lembaga keuangan yang sehat secara individual dan diawasi dengan baik, risiko yang dianggap terdiversifikasi

dengan baik, dan infrastruktur kelembagaan yang tampaknya kuat, risiko sistemik tetap muncul, tidak terdeteksi untuk beberapa waktu, dan kemudian menciptakan kekacauan besar. Sejak saat itu, melalui pemodelan analitis, pengumpulan informasi, identifikasi, dan pemantauan yang lebih baik serta fokus pada kebijakan makroprudensial, risiko sistemik mendapat fokus yang lebih besar. Namun, upaya ini tidak cukup. Perspektif yang mengakui secara lebih eksplisit interaksi, kegagalan pasar, dan eksternalitas masih diperlukan. Pandangan sistem ini harus mencakup tetapi tidak hanya terbatas pada tinjauan stabilitas keuangan (publik), tes stres skala besar, dan analisis serupa lainnya.

Jika insentif pelaku pasar langsung dan pemantau tambahan gagal mendeteksi dan bertindak atas risiko yang dapat menjadi sistemik, badan pengatur dan pengawas menjadi pertahanan terakhir, tetapi penting. Namun, kelemahan dalam pengawasan dan penangkapan badan-badan, secara nasional dan internasional, kadang-kadang juga mempengaruhi stabilitas keuangan (dan mungkin juga efisiensi penyediaan dan akses ke layanan keuangan oleh banyak kelompok dalam masyarakat). Penangkapan badan pengatur, pengawas, dan badan pengawasan publik lainnya terjadi dalam banyak cara dan dapat merusak stabilitas dan efisiensi keuangan. Regulator, supervisor, dan banyak pejabat lain yang gagal dalam peran kebijakan publik mereka, hanya menderita sedikit biaya *ex post* (dalam hal kehilangan pekerjaan, misalnya). Pada saat yang sama, hanya sedikit jika ada pejabat yang menerima hadiah apa pun karena menemukan risiko lebih awal atau mencoba menandai masalah yang akan segera terjadi. Dengan demikian, meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas peraturan nasional dan internasional harus menjadi landasan pendekatan insentif apa pun untuk mengurangi kemungkinan krisis keuangan.

Krisis keuangan global menyebabkan pihak Bank meningkatkan rate untuk meredam inflasi yang diakibatkan turunnya nilai tukar mata uang. Kenaikan sejumlah rate ini direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank secara langsung. Selanjutnya, kenaikan nilai bunga ini memungkinkan krisis keuangan global ini akan mempengaruhi nilai return karena pada dasarnya krisis keuangan akan mempengaruhi hasil bagi pengusaha untuk mendapatkan laba optimal. Dalam konteks meningkatnya tingkat bunga pada regulasi perbankan menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank meningkat, namun bagi para investor kenaikan suku bunga ini tidak akan begitu menarik karena investor akan mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi.

Selain meningkatkan rate untuk meredam inflasi, dari keuangan global tersebut mendorong kembali regulasi perbankan mendorong kembali sistem keuangan secara dramatis guna menjaga hubungan dan kepercayaan masyarakat, dalam hal tersebut mengharuskan pihak perbankan untuk memutuskan adanya atau tidak adanya layanan ritel atau terlibat dalam perbankan investasi, sehingga mengisolasi kegiatan perbankan yang jauh lebih beresiko.

Selanjutnya, pelajaran yang diambil dalam krisis keuangan global adalah pentingnya kebijakan moneter yang longgar pada saat krisis dan perlunya ekspansi fiskal guna mendorong pemulihan keuangan. Dari kemampuan untuk belajar dari permasalahan krisis keuangan global sebagai model untuk pembuatan kebijakan yang selanjutnya ditingkatkan untuk posisi keuangan yang dapat bertahan dan kokoh. Selanjutnya, pada akhirnya kebijakan moneter ekspansif yang diperkuat oleh dorongan bank sentral independen memiliki dampak terbesar dalam jangka waktu yang panjang, sementara itu antusiasme untuk ekspansi fiskal menguap relatif cepat karena semua pihak pemerintah mengkhawatirkan beban hutang yang meningkat. Hasilnya adalah periode pemulihan krisis keuangan berlangsung agak lama di berbagai negara,

yang ditandai dengan penghematan dan ketidaksetaraan yang lebih besar, sementara dari hasil rate suku bunga yang dapat dikatakan rendah diperpanjang selama masa krisis keuangan global.

Pengalaman krisis keuangan tahun 1998-2003 telah membawa dunia perbankan Indonesia mampu bertahan dalam krisis 2008. Hal ini dikarenakan krisis 1998 telah mempengaruhi perbaikan pada beberapa aspek, antara lain transparansi yang memenuhi akuntabilitas dan efektifitas, profesionalisme dan kompetensi, pemenuhan ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian. Demikian juga, bank tidak lagi berperan sebagai kasir dari sejumlah perusahaan dan grup perusahaan tertentu, terpeliharanya posisi eksposur (exposure) valas tanpa resiko (long or square foreign exchange net open position) yang terkandung pada neraca bank, suasana persaingan antar bank sehat baik yang bercirikan oligopoli untuk antar bank besar dan monopolistic competition bagi bank menengah ke bawah.

Pelajaran yang dapat di garis bawahi dari krisis keuangan global selanjutnya adalah adanya pengakuan akan hubungan sistem moneter internasional dan stabilitas keuangan. Gambaran akan perang nilai tukar mata uang ketika banyak negara di dunia ini mendevalusi mata uang negara mereka untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif, dipercaya telah merusak sistem perdagangan dan pembayaran global. Menyebarkan ketidakstabilan keuangan melalui aliran uang panas yang melintasi perbatasan. Untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dalam sistem internasional yang komprehensif dengan kontrol modal yang diatur oleh dana moneter Internasional. Pengelolaan arus modal dirasa sangat disarankan untuk mendukung penyesuaian makroekonomi dan menjaga kestabilan keuangan, dalam hal ini menandai perubahan penting dari agenda pasar bebas.

Melihat dan mendelik atas permasalahan krisis keuangan global yang telah terjadi di masa lalu mengabaikan banyak reformasi peraturan dan banyak perubahan struktur dalam perbankan dan keuangan global. Penting untuk dicatat dan pelajari kontrobusi perkembangan pada evolusi regulasi dan kerjasama internasional, terdapat 3 (tiga) inovasi menonjol dalam regulasi perbankan dan keuangan global, yang pertama ialah pertukaran bank sentral, kerja sama internasional dalam lintas batas, dan terkikisnya antara perbankan ritel dan investasi.

Reformasi kerangka peraturan global mencari untuk memperkuat ketahanan bank terhadap guncangan yang merugikan melalui peningkatan persyaratan untuk modal dan likuiditas berkualitas lebih tinggi; mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh hal-hal yang penting secara sistemik lembaga keuangan dan mengurangi subsidi publik implisit; dan aktifkan yang efektif resolusi bank. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan default untuk bank besar yang aktif secara internasional ke tingkat yang rendah, dan secara signifikan meningkatkan kapasitas sistem untuk menyerap kegagalan sebuah institusi besar. Dengan demikian, reformasi melampaui peningkatan kesehatan masing-masing bank dan mencakup perspektif makroprudensial atau seluruh sistem dari risiko terhadap stabilitas keuangan (yaitu, risiko sistemik) Beberapa aspek reformasi telah dilaksanakan, sementara yang lain tunduk pada pengaturan transisi atau akan diperkenalkan dalam waktu dekat bertahun-tahun.

Penyesuaian terhadap lingkungan pasca krisis telah terjadi tidak hanya melalui perubahan dalam skala kegiatan - margin intensif - tetapi juga melalui masuk dan keluar bank - margin yang luas. Jumlah bank telah turun di sebagian besar negara selama dekade terakhir. Dalam beberapa kasus, ini tampaknya menjadi kelanjutan dari proses konsolidasi yang sebelumnya sedang berlangsung (misalnya di euro wilayah, Swedia, Swiss dan Amerika Serikat). Pengurangan jumlah bank pasca-krisis terutama di kalangan yang lebih kecil institusi, selain dari segelintir

bank besar yang tertekan di kawasan euro dan mundurnya beberapa bank internasional dari pasar luar negeri tertentu. Mencerminkan secara relative sedikit aktivitas konsolidasi di antara institusi terbesar, nilai merger bank dan transaksi akuisisi (M&A) di beberapa negara maju besar telah lemah dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik 5, panel tengah). Di kawasan euro, penurunan pasca-krisis dalam M&A bank lebih menonjol untuk transaksi lintas batas daripada transaksi domestik. Tren ini mungkin menunjukkan bahwa bank telah mengarahkan kembali perhatian terhadap pasar dalam negeri dan/atau mengangkat "tingkat rintangan" mereka untuk lintas batas kesepakatan khususnya. Pola pasca-krisis dalam konsentrasi mengarah ke sistem perbankan yang lebih besar konsolidasi di negara-negara maju besar daripada yang disarankan oleh data M&A. Rasio konsentrasi - diukur sebagai bagian dari aset sistem perbankan yang dimiliki oleh lima bank terbesar - telah meningkat di kawasan euro dan Amerika Serikat, di mana Konsolidasi bank sebagian merupakan konsekuensi dari penanganan dampak krisis. Namun konsentrasi juga meningkat di beberapa negara yang tidak terlalu terpengaruh oleh krisis dan di mana nomor bank memiliki terus berkembang atau tetap stabil (Australia, Brasil, Singapura). Sebaliknya, telah terjadi penurunan konsentrasi di beberapa ekonomi (Belgia, Cina, India dan Meksiko). Secara keseluruhan, konsentrasi pada sistem perbankan cenderung meningkat sejak krisis, dengan beberapa pengecualian yang jelas. Meskipun demikian, rasio konsentrasi median lintas negara tidak berubah, dan hanya ada sedikit perubahan dalam penyebaran rasio konsentrasi di seluruh negara.

Selain itu, periode pasca-krisis telah melihat perubahan signifikan dalam orientasi strategis banyak perusahaan perbankan. Secara garis besar, bank telah menilai kembali usaha mereka sebelumnya menjadi kegiatan perdagangan serta ketergantungan yang tumbuh pada sumber grosir pendanaan, terkait dengan permodalan dan regulasi likuiditas yang lebih ketat. Penggunaan setoran pendanaan telah meningkat, sementara bisnis cenderung direposisi ke arah yang lebih rendah kegiatan yang kompleks dan kurang padat modal, termasuk perbankan ritel dan, di beberapa kasus, manajemen kekayaan. Pola-pola ini telah terbukti dalam strategi perubahan yang diterapkan oleh banyak bank, dan dalam komposisi neraca dan campuran pendapatan. Ada juga fokus ulang pada bisnis pasar dalam negeri atau asing inti pasar.

Krisis mengungkapkan bahwa banyak bank tidak mempertahankan modal yang memadai dan penyangga likuiditas untuk mengatasi kondisi keuangan makro yang tertekan, apalagi risiko keuangan yang berlebihan yang telah diambil oleh beberapa bank ekonomi maju. Menanggapi persyaratan peraturan, sektor perbankan secara global telah meningkatkan ketahanannya terhadap guncangan yang merugikan melalui penguatan substansial dari posisi modal. Semua bank besar dalam pemantauan global memenuhi rasio regulasi. Sejak krisis, stress test bank menjadi cara yang semakin penting bagi komunitas pengawas (dan bank itu sendiri) untuk menilai ketahanan bank terhadap kondisi buruk dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan mendukung ekonomi riil sepanjang siklus kredit. Supervisor perbankan juga mendorong praktik manajemen risiko dan modal, serta mendukung pasar dan kepercayaan pemangku kepentingan di bank. Hal ini cenderung berwawasan ke depan, berbasis skenario dan terintegrasi ke dalam proses pengawasan secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan penting lintas yurisdiksi.

Tata kelola dan manajemen risiko yang tidak memadai terlihat jelas dalam hasil risiko yang buruk di banyak bank selama krisis. Mereka juga terlihat dalam frekuensi dan keparahan contoh risiko perilaku bank dan biaya hukum dan reputasi terkait selama ini bertahun-tahun. Kebutuhan

akan manajemen risiko yang kuat mungkin menjadi lebih penting sejak krisis: ekspektasi pengawasan dan pengawasan pemangku kepentingan telah meningkat, sementara kompleksitas dalam beberapa aspek manajemen risiko telah berkembang - misalnya, dalam kaitannya untuk memodelkan risiko dan keamanan siber. Namun bagaimana bank mengambil, mengukur dan mengendalikan risiko cenderung jauh lebih sulit untuk mengamati dari beberapa aspek lain dari perbankan. Oleh karena itu, Grup menghubungi pengawas bank di yurisdiksi anggota untuk memperoleh informasi tentang risiko bank pengelolaan. yurisdiksi memberikan informasi tentang set masalah ini. Informasi ini telah dilengkapi dengan beberapa pejabat lainnya dan studi sektor swasta. Singkatnya, bank tampaknya telah meningkatkan tata kelola risiko dan risikonya praktik manajemen sejak krisis, meskipun kemajuan lebih lanjut sering diperlukan untuk memenuhi harapan pengawasan. Mungkin sulit untuk menguraikan driver dari perbaikan: sementara banyak yang mencerminkan perubahan peraturan dan pengawasan, bank telah juga telah menyesuaikan sebagai akibat dari pengalaman krisis dan tekanan pasar mereka.

Selanjutnya, adanya Undang-undang yang mengharuskan pihak perbankan untuk menerapkan lebih banyak lagi sumber daya mereka sendiri dan sumber daya pemiliknya untuk penyelesaian jika terjadi kebangkrutan dapat mengurangi panggilan wajib pajak dalam krisis di masa depan. Seperti di Eropa, yang terjadi koordinasi pengawasan yang jangkauannya lebih besar melalui Mekanisme Pengawasan Tunggal dan rencana asuransi simpanan serta mekanisme penyelesaian bersama telah membuat sistem di sana lebih kuat. Di Inggris Raya, Komite Kebijakan Keuangan baru ditugaskan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi risiko terhadap stabilitas keuangan. Inovasi tersebut mencerminkan pergeseran pengawasan makroprudensial, yaitu mengidentifikasi risiko sistemik daripada hanya memeriksa neraca bank individu. Sebaliknya, salah satu hasil dari krisis masih bersama kita. Suku bunga rendah (kadang-kadang bahkan negatif) dan inflasi yang relatif rendah menciptakan lingkungan keuangan dan ekonomi yang sangat tidak biasa yang memiliki keistimewaan bagi peminjam daripada penabung. Sebagai tanggapan, masalah utang perusahaan meningkat seperti halnya utang rumah tangga, sementara pasar ekuitas melonjak. Kebijakan moneter inkonvensional juga telah memperbaharui perhatian akademis tentang dampak kebijakan moneter AS terhadap arus keuangan global [4].

Lingkungan hukum saat ini seharusnya membuat pemerintah secara signifikan lebih sulit untuk menggunakan proteksionisme yang tidak terkendali daripada di tahun 1930-an. Disiplin WTO mencegah negara-negara membangun hambatan perdagangan internasional di atas tingkat yang disepakati. Perjanjian investasi dan aturan tentang bantuan/subsidi negara umumnya melarang tindakan diskriminatif yang akan mendukung produsen dalam negeri dengan mengorbankan perusahaan milik asing [5].

Tentu saja, ada juga pertanyaan abadi apakah hukum internasional penting. Ciri-ciri khususnya ialah seperti tidak adanya mekanisme penegakan yang efektif dan jarangya pemulihan yang berlaku surut, melemahkan keefektifannya. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional yakni reputasi, timbal balik, dan pembalasan dapat berfungsi relatif baik dalam keadaan normal. Namun, efektivitas faktor-faktor tersebut tampaknya akan berkurang pada saat gejolak ketika kepentingan pelestarian diri masing-masing negara kemungkinan akan menang, kecuali ada komitmen yang jujur untuk mengatasi krisis melalui kerja sama. Di masa lalu, negara-negara telah bertindak melanggar hukum internasional ketika mereka menganggap kepentingan nasional mereka jauh lebih besar daripada imbalan dari kepatuhan: invasi ke Irak dan pembangunan tembok Israel adalah contoh terbaru.

Karena sejarah krisis keuangan sangat baru, memahami dinamikanya memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengantisipasi krisis serupa di masa depan dan tekanan konstitusionalnya. Namun pemeriksaan yang cermat terhadap krisis terbaru dan juga masa lalu mengungkapkan kebenaran yang berlawanan: kepatuhan terhadap supremasi hukum sebenarnya lebih penting selama periode krisis ekonomi, baik untuk memulihkan kemakmuran ekonomi jangka pendek selama krisis maupun serta untuk dampak sistemik jangka panjang.

Ada empat alasan mengapa demikian. Pertama, kepatuhan terhadap supremasi hukum diperlukan untuk kemakmuran ekonomi secara umum, tetapi terlebih lagi selama krisis ekonomi. Kedua, kepatuhan terhadap supremasi hukum diperlukan untuk menahan oportuniste politisi dan kepentingan khusus yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh krisis untuk membonceng kepentingan sempit mereka sendiri, seringkali tanpa hubungan dengan masalah nyata. Ketiga, begitu diskresi dilepaskan selama krisis, sejarah memberi tahu kita bahwa disipasi krisis tidak mendorong kembalinya supremasi hukum. konsolidasi diskresi pemerintah daripada batasan baru di atasnya. Dan akhirnya, potensi tindakan diskresioner belaka mempromosikan bahaya moral, sehingga menciptakan kondisi untuk intervensi lebih lanjut. Jadi, sementara sedikit yang hilang dalam jangka pendek dengan mengikat tangan pemerintah dari kebijaksanaan, yang lebih penting satu-satunya cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan melestarikan kebebasan dalam jangka panjang, dan untuk menghindari justru keadaan yang kemudian membenarkan pemerintahan sewenang-wenang di masa depan. intervensi adalah untuk membatasi diskresi pemerintah dalam jangka pendek [6].

Terutama, pengambilan keputusan pemerintah yang tidak berprinsip apakah akan menyelamatkan lembaga keuangan tertentu menimbulkan ketidakpastian dan moral hazard tentang kebijakan pemerintah yang membuat krisis keuangan jauh lebih buruk daripada jika pemerintah bertindak sesuai dengan pendekatan yang berprinsip. Selain itu, pemerintah menggunakan pengaruhnya selama bailout mobil untuk memajukan agenda politiknya mempromosikan pembuatan "green car", kendaraan bertenaga bahan bakar alternatif yang seharusnya ramah lingkungan dan kendaraan yang mendapatkan jarak tempuh lebih tinggi. begitu batasan konstitusional dan supremasi hukum dikesampingkan, rezim baru menciptakan pemenang dan pecundang yang jelas dan pemenang memiliki sedikit insentif untuk mendukung kembalinya supremasi hukum. Sering diabaikan bahwa nilai negara hukum adalah untuk memberi manfaat bagi warga negara biasa.

Sejak krisis, juga diketahui bahwa skema asuransi simpanan eksplisit telah diperkenalkan dan cakupan serta cakupannya diperluas di banyak negara, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Ini menjadi perhatian karena penjaminan simpanan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pengaturan kelembagaan yang lemah. Cara penting lainnya untuk meningkatkan disiplin pasar adalah melalui regulasi modal. Antara lain, regulasi permodalan memastikan bahwa pemilik bank memiliki "skin in the game" yang cukup sehingga mereka cenderung tidak mengambil risiko berlebihan. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa pengaturan permodalan selalu menjadi jantung dari peraturan bank [7].

Berdasarkan laporan IMF's World Economic Outlook, diperkirakan laju perekonomian global pada tahun 2013 hanya tumbuh 2,9%, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya yaitu 3,2% [8]. IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2014, dari proyeksi awal 3,8% menjadi 3,6%. Adapun proyeksi pertumbuhan di beberapa ekonomi dunia adalah sebagai berikut:

Beberapa negara di kawasan eurozone masih mengalami permasalahan dalam ekonominya. Berdasarkan proyeksi IMF bulan Oktober 2013, kawasan euro hanya akan mencapai pertumbuhan 1% pada tahun 2014 [9].

Di Jepang, kebijakan stimulus fiskal dan moneter ekspansif turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi yang sehat. Meski demikian, berakhirnya stimulus fiskal dan reconstruction spending, dipadu dengan peningkatan pajak konsumsi diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dari 2% pada 2013 menjadi 1,25% pada tahun 2014.[10] Ekonomi Amerika Serikat untuk 2014 diperkirakan akan lebih stabil, di mana permintaan domestik swasta akan meningkat antara lain melalui permintaan kredit perumahan yang mengalami pertumbuhan positif. Sementara pertumbuhan ekonominya diperkirakan meningkat dari 1,5% pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,5% pada tahun 2014.

Berdasarkan proyeksi IMF pada bulan Oktober 2013, pertumbuhan di negara emerging market dan negara berkembang lainnya adalah sebesar 4,5% pada tahun 2013 dan 5% di tahun 2014. Besaran tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5% apabila dibandingkan proyeksi IMF Juli 2013. Beberapa faktor yang masih dipandang dapat mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan yaitu:

- Deleveraging sektor swasta, khususnya sektor perbankan.
- Uncertainty: ketidakpastian arah kebijakan fiskal konsolidasi Amerika dan penyelesaian krisis utang Eropa menyebabkan timbulnya sentimen negatif pada pasar keuangan global.
- Konsolidasi Fiskal: Program konsolidasi fiskal dan medium-term fiscal plan di negara maju merupakan kunci utama penyelesaian krisis ekonomi global.
- Rebalancing: menurunnya global imbalance akan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik dan kuat.
- Emerging markets: melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diantaranya disebabkan oleh menurunnya permintaan global dan implikasi kebijakan domestik untuk mengurangi laju pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi (overheating). (Terakhir dimutakhirkan: 4 Februari 2022).

Contoh lainnya kita bisa lihat dari kasus berikut: kenaikan tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank konvensional meningkat, namun kenaikan tingkat bunga ini tidak akan menarik bagi investor yang akan mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, kenaikan tingkat bunga akan menurunkan minat masyarakat yang menyimpan dana di bank syariah karena tingkat marginnya lebih rendah di banding dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional. Namun, bank syariah akan lebih menguntungkan bagi investor dikarenakan margin yang dibebankan pada investor bank syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional.

Dalam menjaga likuiditas, tingkat bunga masih menjadi benchmark bagi bank syariah dalam penentuan tingkat margin dan nisbah bagi hasil bank syariah. Dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat fee/bagi hasil pada tabungan dan deposito, membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional. Keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya dana yang keluar untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga (DPK) yang masuk sehingga konsekuensinya financing deposit rasio (FDR) bank syariah meningkat. Kondisi berbeda ada pada pihak penabung yang akan lari ke bank konvensional karena akan menikmati keuntungan bunga lebih tinggi dibanding dengan bank

syariah. Meningkatnya dana keluar akan meningkatkan resiko likuiditas bank syariah. Untuk mengatasi keadaan ini, bank syariah perlu meningkatkan rate bonus/fee/bagi hasil untuk giro, tabungan, dan deposito.

Dari data pada tabel 1, dapat diketahui perbandingan tingkat bunga dari dana pihak ketiga dengan pembiayaan bank konvensional dengan bank syariah. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat imbalan, bagi hasil, fee bonus pada bank syariah. Tingginya bagi hasil/fee/bonus untuk tabungan di tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa dalam mempertahankan likuidasi bank syariah masih mengandalkan tabungan. Sementara itu, bank konvensional lebih mempertahankan dana-dana berjangka melalui tingkat bunga yang tinggi.

Data pada bagian pembiayaan menunjukkan bahwa tingkat margin murabahah menepati posisi tertinggi di antara tingkat margin/bagihasil/fee/bonus produk pembiayaan yang lain. Sedangkan secara berturut-turut istisna dan mudharabah pada tingkat kedua dan ketiga. Nilai ini lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga pinjaman modal kerja, investasi dan konsumsi. Nilai equivalent rate imbalan/bagi hasil/fee/bonus yang lebih rendah dibanding dengan bank konvensional tentu akan menjadikan bank syariah lebih kompetitif.

Tingkat kemampuan nasabah membayar kewajiban yang diperlihatkan dari NPF dalam kondisi krisis menunjukkan penurunan di bank syariah, artinya tingkat resiko pinjaman/pembiayaan bermasalah di bank syariah menurun di saat krisis keuangan. Di saat yang sama jumlah FDR bank syariah meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa di saat krisis pembiayaan bank syariah lebih murah dibandingkan dengan bank konvensional.

Krisis keuangan ini menyebabkan dana yang direpatriasi berjumlah besar sehingga menimbulkan penjualan saham dan surat berharga utang dalam jumlah yang besar. Keadaan ini menjadikan harga sekuritas saham dan surat berharga utang akan turun sehingga indeks harga saham turun tajam. Hitungan suku bunga bagi surat berharga utang yang membayar pendapatan tetap (fixed income securities) akan naik. Penurunan harga sekuritas akan menimbulkan kerugian (capital loss) sehingga modal perusahaan dan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) menipis. Turunnya kepercayaan terhadap pasar domestik menyebabkan permintaan terhadap dolar naik signifikan, yang berarti mengakibatkan nilai dolar terhadap rupiah naik.

Depresiasi rupiah tidak saja disebabkan langsung oleh penarikan dana tersebut di atas, tetapi juga berpotensi diperparah karena lebih besar dari tingkat depresiasi mata uang di luar dolar. Depresiasi hampir semua mata uang di luar dolar karena dolar ditarik kembali untuk memback-up likuiditas perusahaan AS. Keadaan ini menjadikan dolar semakin mahal karena dolar semakin langka dan permintaan dolar pun akhirnya meningkat.

Krisis keuangan juga mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global. Sesungguhnya turunnya nilai rupiah ini bisa meningkatkan nilai ekspor, namun krisis keuangan menyebabkan turunnya permintaan komoditas dari luar negeri.

Turunnya ekspor mengurangi pendapatan negara sehingga jika tidak diimbangi dengan turunnya pengeluaran dollar melalui penurunan tingkat impor akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan mempersulit modal masuk seiring dengan keringnya likuiditas

pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan impor di saat pasar ekspor stagnan akan menekan kenaikan cadangan devisa dan berarti akan memunculkan ekspektasi gejolak depresiasi rupiah. Juga, kemerosotan akan mengacaukan dan menurunkan produksi dalam negeri yang juga berakibat pengurangan pekerja atau peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi dampak krisis ini, BI menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait neraca pembayaran. Kebijakan yang dijalankan adalah memperkuat sektor perbankan untuk mengantisipasi dampak pengeringan likuiditas global, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diupayakan pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap, dan mencari pembiayaan untuk mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar, seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral. Secara umum bisa disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global. Sistem keuangan syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan bank syariah mampu bertahan dari fluktuasi tingkat bunga yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah yang disebabkan langkanya dolar di pasar. Selain itu, kinerja keuangan suatu bank dibandingkan dengan bank konvensional menunjukkan kondisi keuangan yang konsisten dan efisien.

4. KESIMPULAN

Setelah melihat kembali evolusi reformasi, dapatkah kita sekarang mengatakan bahwa respons regulasi terhadap krisis telah berakhir? Tentu saja, cadangan modal bank telah meningkat, sehingga mereka lebih aman. Undang-undang yang mengharuskan bank untuk menerapkan lebih banyak sumber daya mereka sendiri dan sumber daya pemilikinya untuk penyelesaian dalam kasus kebangkrutan dapat mengurangi panggilan wajib pajak dalam krisis di masa depan. Di Eropa, koordinasi pengawasan yang lebih besar melalui Mekanisme Pengawasan Tunggal dan rencana asuransi simpanan serta mekanisme penyelesaian bersama telah membuat sistem di sana lebih kuat. Inovasi tersebut mencerminkan pergeseran pengawasan makroprudensial, yaitu mengidentifikasi risiko sistemik daripada hanya memeriksa neraca bank individu. Sebaliknya, salah satu hasil dari krisis masih bersama kita. Suku bunga rendah (kadang-kadang bahkan negatif) dan inflasi yang relatif rendah menciptakan lingkungan keuangan dan ekonomi yang sangat tidak biasa yang memiliki keistimewaan bagi peminjam daripada penabung. Sebagai tanggapan, masalah utang perusahaan meningkat seperti halnya utang rumah tangga, sementara pasar ekuitas melonjak. Kebijakan moneter yang tidak konvensional juga telah memperbarui perhatian akademis tentang dampak kebijakan moneter AS terhadap arus keuangan global

Dalam krisis ekonomi global, hukum berperan sebagai regulator dalam rangka mengembalikan kestabilan ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional yakni reputasi, timbal balik, dan pembalasan dapat berfungsi relatif baik dalam keadaan normal. Namun, efektivitas faktor-faktor tersebut tampaknya akan berkurang pada saat gejolak ketika kepentingan pelestarian diri masing-masing negara kemungkinan akan menang, kecuali ada komitmen yang jujur untuk mengatasi krisis melalui kerja sama. Di masa lalu, negara-negara telah bertindak melanggar hukum internasional ketika mereka menganggap kepentingan nasional mereka jauh lebih besar daripada imbalan dari kepatuhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Atmadja, "Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya," *J. Akunt. dan Keuang. Univ. Kristen Petra*, vol. 2, no. 1, 2000, doi: 10.9744/jak.2.1.pp. 83-94.
- [2] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333-339, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- [3] Sudarsono, "Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia," *LISAN AL-HAL J. Pengemb. Pemikir. dan Kebud.*, vol. 13, no. 2, pp. 385-400, 2019, doi: 10.35316/lisanalhal.v13i2.602.
- [4] C. R. Schenk, "The global financial crisis and banking regulation: Another turn of the wheel?," *J. Mod. Eur. Hist.*, vol. 19, no. 1, pp. 8-13, Nov. 2020, doi: 10.1177/1611894420974252.
- [5] L. M. Fathun, "Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada," *J. Asia Pacific Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 15, 2017, doi: 10.33541/japs.v1i1.498.
- [6] Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Wahana J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 14, no. 02, pp. 91-100, 2011, [Online]. Available: <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/wahana/article/view/52/pdf>
- [7] K. Muslimin, "Kapitalisme Di Era Pasar Bebas dan Realitas Kondisi Ekonomi Kekiknian," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 40-49, 2017, doi: 10.26618/j-hes.v1i1.1634.
- [8] A. Bachtiar, "Krisis Ekonomi Dunia 2022," *J. Ilmu Ekon. Pembang.*, vol. 18, no. 2, 2022.
- [9] C. M. Kenneth S Rogoff, "Mengapa Krisis Keuangan Kembali Terulang," vol. 38, no. 1, pp. 195-219, 2012.
- [10] H. Rahim, "Optimisme pertumbuhan asuransi indonesia; proyeksi perkembangan lima tahun (2014-2018)," *J. Asuransi dan Manaj. Resiko*, vol. 1, no. 2, pp. 1-21, 2013.

=== HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN ===